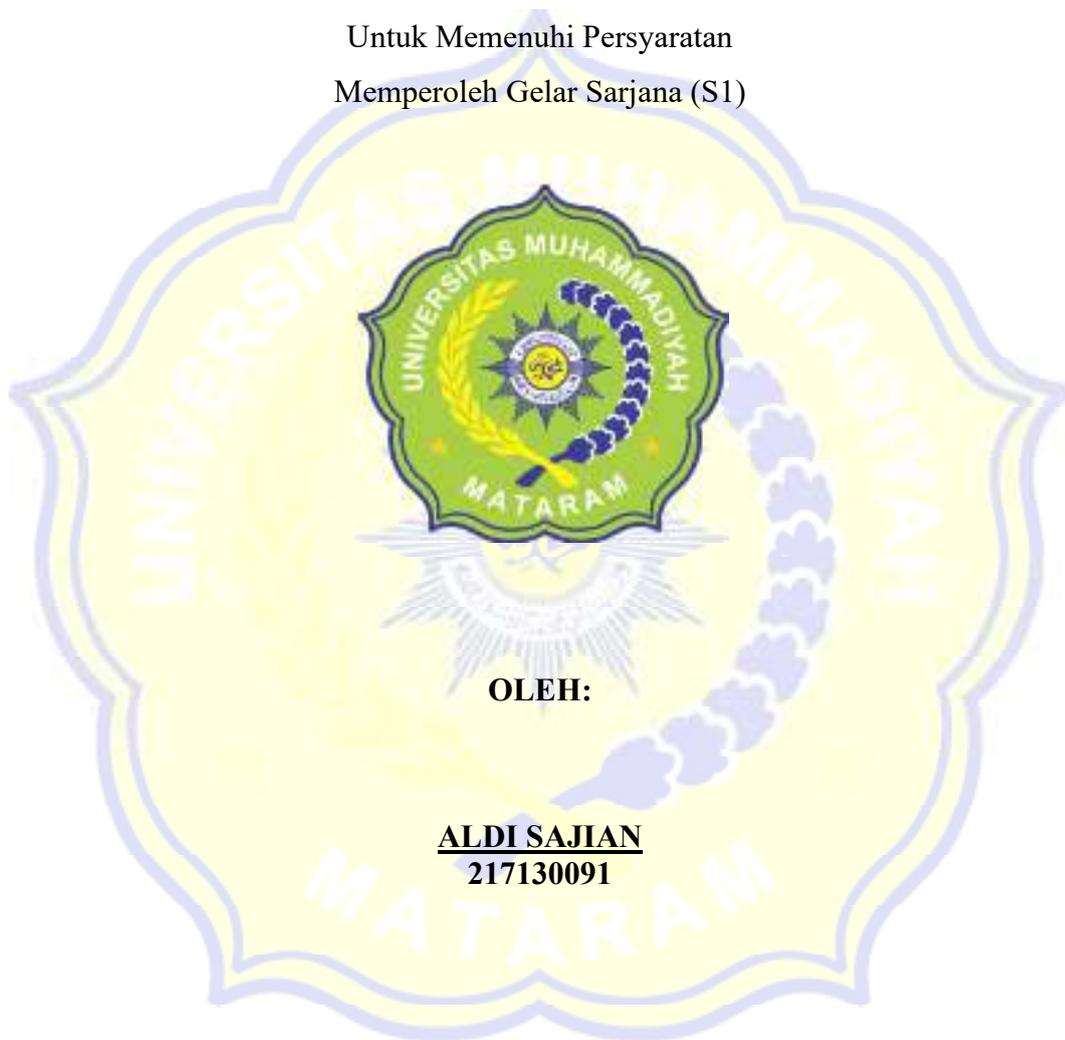


SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH EKONOMI
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM
TAHUN 2020

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH:

ALDI SAJIAN
217130091

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH EKONOMI
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM
TAHUN 2020



Disusun dan diajukan oleh:

ALDI SAJIAN
NIM. 217130091

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi

Matarm, 15 Februari 2021

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

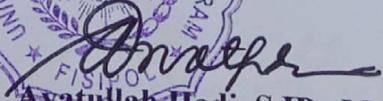
Pembimbing II


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui.

**Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan**




Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH EKONOMI
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM**

TAHUN 2020

Oleh

ALDI SAJIAN
NIM. 217130091

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN. 0806066801
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN. 0816057902
3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**
NIDN. 0815118302

Penguji I (.....)

Penguji II (.....)

Penguji III (.....)

Ketua Prodi Program Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

**Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

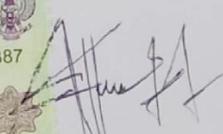
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi ini, telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan




(Aldi Sajjan)
NIM.217130091



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audi Sajian

NIM : 217130091

Tempat/Tgl Lahir : 00, Donggo, 01-01-1999

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No. Hp/Email : 085-333-784-835 (a.sajian99@gmail.com)

Judul Penelitian : - Implementasi program bankan sosial tunai (BST) dalam upaya penganggulangan masalah ekonomi akibat pandemi COVID-19 di kota Mataram tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Maret 2021

Penulis



Audi Sajian
NIM. 217130091

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Sajian.....
 NIM : 217130091.....
 Tempat/Tgl Lahir : 01. Donggo. 01. 01. 1999.....
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan.....
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....
 No. Hp/Email : 085.333.784.035. Aldi.Sajian99@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Program Bankam Sosial tunai (BST) dalam upaya penanggulangan masalah ekonomi akibat pandemi covid-19 di kota Mataram.....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Maret 2021

Penulis



Aldi Sajian
NIM. 217130091

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904



MOTTO HIDUP

***“JADI KEJARLAH KEUNGGULAN, MAKA KESUKSESAN AKAN
MENGHAMPIRIMU”***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah penulisan proposal ini dan segala kewajibanku sehingga penulis dapat penyelesaian penulisan proposal yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020”** tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penulisan Proposal ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abd Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan hingga penulis Skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Umumnya Dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan balasan disisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis sebagai manusia biasa luput dari kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu apabila terdapat kekurangan dalam Penulisan proposal ini, baik dari segi penyajian isi maupun tata bahasa, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi dan bagi pembaca pada umumnya.

Mataram, 13 Januari 2021
Penulis

ALDI SAJIAN
NIM. 217130091

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program bantuan sosial tunai (BST) dalam upaya penanggulangan masalah ekonomi akibat pandemi covid-19 di kota mataram. Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat dunia khususnya Rakyat Indonesia. Kasus ini muncul pertama kali tepatnya di Kota Wuhan mulai akhir Januari sampai dengan awal Februari 2020. Laporan mengenai kasus Covid-19 datang dari wilayah Hubai hingga menyebar ke berbagai provinsi di seluruh Negara China, dan pada akhirnya penyebaran virus tersebut mulai tersebar luas hingga ke seluruh negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST di Kota Mataram bisa dibilang sudah cukup efektif. Dan dari aspek prosedural telah telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, meskipun secara nominal dana bantuan tersebut tak sepenuhnya mampu membendung kebutuhan mereka dalam sebulan. Dari aspek lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik), implementasi program BST masih terdapat polemik terutama pada persoalan data KPM yang masih ditemukan data ganda. Hal menjadikan implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, beberapa kelompok kepentingan dan kelompok penekan melakukan kritik terhadap data-data KPM yang dipake dalam penyaluran dana program BST tersebut.

Kata Kunci: Implementasi; Program BST; Masalah Ekonomi; Pandemi Covid-19

ABSTRACT

This study aimed to see how the social-cash assistance program (BST) was introduced in Mataram City in order to mitigate economic problems caused by the Covid-19 pandemic. Covid-19 is a virus that continues to plague the international community, especially the Indonesian people. From late January to early February 2020, this case first surfaced in Wuhan. The Covid-19 case started to spread from the Hubai region to various provinces in China, and the virus gradually spread widely throughout China and all countries throughout the world. This thesis utilizes qualitative analysis techniques. Qualitative research aims to understand better phenomena such as behavior, perception, motivation, action, and emotion in research subjects.

This study's findings show that the Standards and Policy Targets in the BST Program Implementation in Mataram are arguably very successful. From a procedural standpoint, it has been operating according to the established framework, even though the aid funds were nominally insufficient to meet their needs in a month. The BST program's implementation is still divisive from an environmental standpoint (economic, social, and political), especially on the issue of KPM data, where duplicate data is still discovered. As a result, the BST program's implementation was unsuccessful and possibly off track. As a result, a number of interest and pressure groups criticized the KPM data used in the BST distribution.

Keywords: *Implementation; BST program; Economy problem; The Covid-19 Pandemic*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vi |
| MOTTO HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 LatarBelakang | 1 |
| 1.2 RumusanMasalah | 7 |
| 1.3 TujuanPenelitian | 7 |
| 1.4 ManfaatPenelitian | 7 |
| 1.4.1 ManfaatTeoritis | 7 |
| 1.4.2 ManfaatPraktis..... | 8 |
| 1.4.3 ManfaatAkademis..... | 8 |

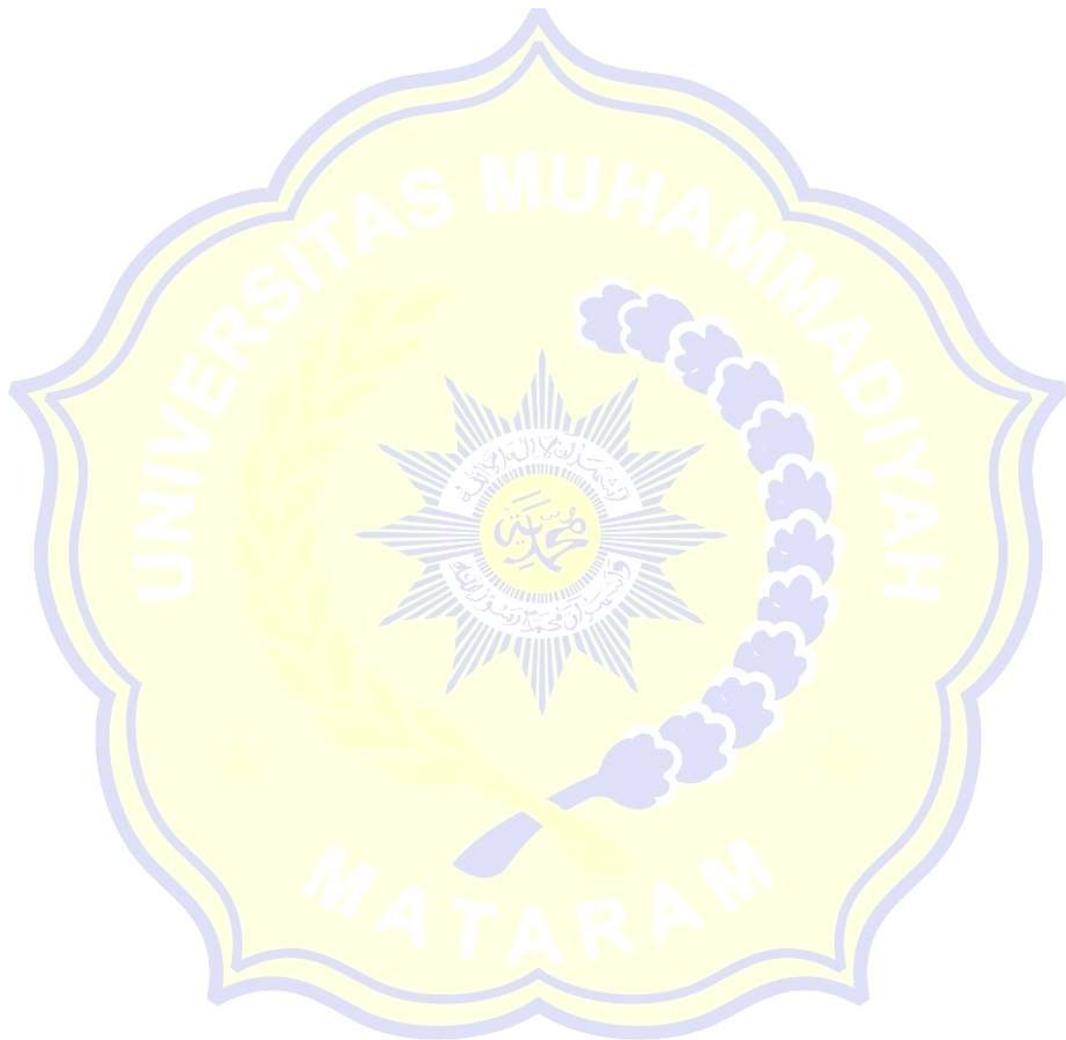
| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 KajianPustaka..... | 9 |
| 2.2 TinjauanTeoritik..... | 14 |
| 2.2.1 Kebijakan | 14 |
| 2.2.2 ImplementasiKebijakan..... | 19 |
| 2.2.3 Pemerintah..... | 26 |
| 2.2.4 CoronaDesase 2019 (Covid-19)..... | 30 |
| 2.2.5 BantuanSosialTunai (BST) | 33 |
| 2.3 Kerangka Pikir..... | 35 |
| 2.4 Definisi Konseptual..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 37 |
| /13.1 JenisPenelitian..... | 37 |
| /13.2 LokasiPenelitian..... | 38 |
| /13.3 WaktuPenelitian..... | 38 |
| /13.4 TehnikPenentuanNarasumber | 38 |
| /13.5 Jenis Data | 39 |
| 3.5.1Data Primer | 39 |
| 3.5.2Data Skunder..... | 40 |
| /13.6 TehnikPengumpulan Data..... | 40 |
| 3.6.1Observasi..... | 40 |
| 3.6.2Wawancara/Interview | 41 |
| 3.6.3Dokumentasi | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 3.7 Tehnik Analisis Data..... | 41 |
| 3.7.1 Reduksi Data | 42 |
| 3.7.2 Penyajian Data | 42 |
| 3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi..... | 42 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 43 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 43 |
| 4.1.1 Kondisi Geografis | 43 |
| 4.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi | 43 |
| 4.1.3 Topografi..... | 44 |
| 4.1.4 Klimatologi..... | 45 |
| 4.1.5 Hidrologi | 45 |
| 4.1.6 Gambaran Geologi | 46 |
| 4.1.7 Kondisi Demografis | 46 |
| 4.1.8 Potensi Daerah Kota Mataram | 47 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial..... | 50 |
| 4.3 Hasil Dan Pembahasan..... | 53 |
| 4.3.1 Implementasi Program bantuan Sosial Tunai (BST) | |
| dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di | |
| Kota Mataram..... | 53 |
| 4.3.2 Standar Dan Sasaran Kebijakan | 57 |
| 4.3.3 Lingkungan Sosial Politik | 71 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| 1.1 Kesimpulan | 76 |

1.2 Saran 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN

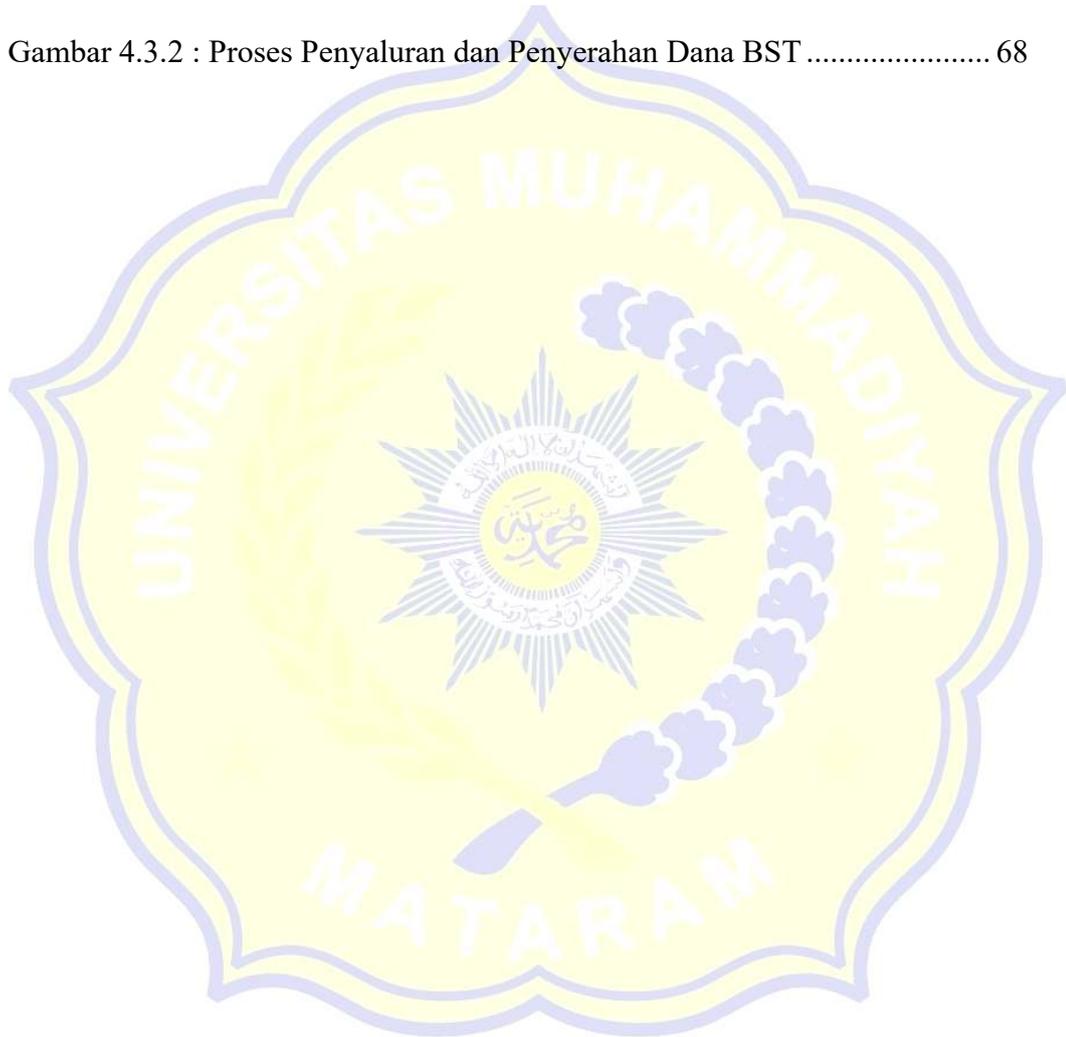


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu | 12 |
| Tabel 2.4 : Definisi Konseptual | 36 |
| Tabel 3.4 : Narasumber Penelitian | 38 |
| Tabel 3.5.1 : Unit Analisa Data Primer | 39 |
| Tabel 3.5.2 : Unit Analisis Data Skunder | 40 |
| Tabel 4.1 : Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015 | 44 |
| Tabel 4.7.1 : Jumlah Penduduk Kota Mataram Perkecamatan Tahun 2020 | 47 |
| Tabel 4.3.2 : DTKS Kota Mataram Tahun 2020..... | 64 |
| Tabel 4.3.2 : Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai(BST) | 69 |
| Tabel 4.3.3 : Kelompok Kepentingan dalam penyaluran BST di Kota Mataram Tahun 2020 | 73 |
| Tabel 4.3.3 : Kelompok Penekan dalam penyaluran BST di Kota Mataram Tahun 2020 | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.3 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram | 35 |
| Gambar 4.2 : Skema Penyaluran Dana BST di Kota Mataram..... | 61 |
| Gambar 4.3.2 : Suasana Pembagian Dana BST | 63 |
| Gambar 4.3.2 : Proses Penyaluran dan Penyerahan Dana BST | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat dunia khususnya Rakyat Indonesia. Kasus ini muncul pertama kali tepatnya di Kota Wuhan mulai akhir Januari sampai dengan awal Februari 2020. Laporan mengenai kasus Covid-19 datang dari wilayah Hubai hingga menyebar ke berbagai provinsi di seluruh Negara China, dan pada akhirnya penyebaran virus tersebut mulai tersebar luas hingga ke seluruh negara di dunia. (Susilo, dkk. 2020:45-46) Tentunya ini mengakibatkan seluruh negara terutama Indonesia lebih berwaspada dengan dikeluarkan kebijakan untuk tetap bekerja dan beraktifitas di Rumah, dan seluruh kegiatan di luar, seperti, sekolah, belanja dan lain-lain mulai dibatasi dan diliburkan.

Akibat penyebaran virus di atas mengakibatkan banyak dari masyarakat dunia terpapar Covid-19, hal ini terbukti pada Tanggal 30 Januari 2020 terdapat 7.736 terkonfirmasi terjangkit virus di wilayah China dan ada terdapat 86 kasus yang dilaporkan oleh beberapa negara lain seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Nepal, Kamboja, Sri Lanka, Jepang, Singapura, Jerman, Prancis dan beberapa negara lainnya yang telah terjangkit virus Covid-19. (Susilo, dkk. 2020:46) Sehingga adanya kasus-kasus bermunculan di mana-mana mengakibatkan seluruh

pemerintahan dari setiap Negara mengeluarkan kebijakan masing-masing mengenai *Lock Down*, mulai dari menutup bandara internasional hingga ekspor-impor barang.

Pada dasarnya Covid-19 yang muncul di Wuhan sebagaimana penjelasan dari WHO merupakan sebuah virus dari subfamily *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *OrdoNidovirales* yang menimbulkan gejala ringan hingga berat sehingga jika terjangkit membuat penderitanya lemas hingga tidak bertenaga. Penyakit ini adalah virus baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia, gejala umumnya hampir sama dengan penderita Demam Berdarah/Malaria, adanya gangguan pernapasan, batuk, demam tinggi, dan sesak napas. Adapun masa inkubasi bila terjangkit Covid-19 rata-rata 5-6 hari dengan masa terpanjang dan yang paling umum dijadikan patokan adalah 14 hari. (Dewi, 2020:56)

Jika dilihat dari gejala di atas, beberapa orang hanya berpikir ini adalah penyakit biasa. Sehingga, beberapa orang menganggap ini tidak terlalu membahayakan jiwa manusia. Namun, keadaan ini membuat beberapa negara di dunia cemas/khawatir. Hal ini dikarenakan, pengetahuan dalam menanggulangi Covid-19 dari setiap negara masih sangat kurang, mengingat alat yang digunakan masih minim dan sangat susah didapatkan. Untuk itu, Covid-19 tidak bisa dianggap sebagai wabah biasa, karena pembuktiannya telah banyak memakan banyak korban dan tidak sedikit analis kedokteran beranggapan bahwa penyakit ini sangat

berbahaya dan mematikan sehingga disarankan untuk tetap di rumah dan jangan keluar. Sebab jika dilihat perkembangannya pada tahun 2020 ini grafik masyarakat terjangkit Covid-19 cukup tinggi yang mengakibatkan seluruh negara termasuk Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. (Telaumbanua, 2020: 60).

Pada penelitian Gupta, Et Al dalam Nurislaminingsih (2020: 23-24), diungkapkan bahwa penyakit Covid-19 sangat rentan pada orang-orang yang sebelumnya telah memiliki riwayat penyakit diabetes dan beberapa penyakit lainnya seperti ginjal, jantung, lanjut usia dan daya tubuh yang lemah/lemas. Sehingga, orang-orang tersebut perlu menjaga imun dan menjaga diri dengan menjalani hidup bersih mulai rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan lain-lain tujuannya untuk menutup risiko penularan.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Jarhult dan El Zowalaty sebagaimana yang dikutip oleh Nurislaminingsih (2020: 23-24). Sistem paru-paru dalam anggota badan manusia sangat rentan terhadap infeksi sebab berhubungan langsung dengan anggota lainnya. Contoh, aktivitas mata ataupun hidung sangat berpengaruh pada terinfeksi paru-paru manusia, seperti halnya menghisap atau pun menghirup udara kotor hal ini akan berdampak pada rusaknya paru-paru. Inilah, yang menjadi jalur masuknya virus Covid-19 sehingga mengakibatkan paru-paru menjadi tidak sehat/tidak berfungsi dengan baik dengan gejala-gejala yang muncul seperti, sesak nafas, batuk, dan flu. Akibat dari virus Covid-19, di

Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Maret 2020 melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ada 10 yang dinyatakan positif Corona (Dewi, 2020: 56).

Terkait perkembangan Virus Corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*. Hal ini disebabkan bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari Covid-19 ini bersifat droplet percikan lender kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan (Yunus dan Rezki, 2020: 230). Seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, dengan tujuan untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan agar kemungkinan peluang akan tertularnya virus ini bisa menjadi rendah. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus tersebut. Oleh karena itu, *social distancing* harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, dilingkungan kerja ataupun dilingkungan rumah tangga.

Salah satu Provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya di kota Mataram juga tidak terlepas dari ancaman Coronavirus Disease (Covid-19). Terbukti Jum'at November 2020, Tim gugus percepatan penanganan Covid-19 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan jumlah pasien positif Covid-19 pada Jum'at pukul 12:00 Wita, bertambah 10 orang sehingga jumlah pasien Covid-19

yang masih dirawat sampai saat ini tercatat 18 orang. Swandiasa yang juga menjabat sebagai kepala dinas komunikasi dan informatika Kota Mataram, mengatakan dengan adanya tambahan 10 orang pasien positif Covid-19 itu, maka secara kumulatif jumlah pasien Covid-19 di Mataram sebanyak 1.229 orang. Dari jumlah itu sebanyak 1.190 dinyatakan sembuh dan 91 orang meninggal dunia (<https://www.antaraneews.com>, diakses pada 6 Desember 2020).

Penyebaran Covid-19 di NTB, yang berawal pada tanggal 24 Maret 2020, dengan cepat merambat di beberapa daerah yang di dalamnya termasuk Kota Mataram. Hal ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Kota Mataram. Akibatnya, sektor perekonomian di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) benar-benar terpuruk.

Pengamat ekonomi Universitas Mataram, Iwan Harsono menyatakan, membangun ekonomi Kota Mataram kedepannya tidaklah sesulit yang dibayangkan. Iwan menyodorkan strateginya dengan memperbaiki struktur ekonomi, peningkatan produksi, dan distribusi termasuk konsumsi. Menurutnya, jika dibandingkan dengan daerah lainnya dalam masa Covid-19 ini dan status Kota Mataram yang masih zona merah, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tidak terlalu menurun drastis (<https://www.gatra.com>, diakses 22 November 2020).

H. Mohan Roliskana selaku wakil Wali Kota Mataram, mengaku memang banyak implikasi dari pandemi Covid-19. Tidak hanya pada aspek kesehatan publik tetapi jugapada ekonomi.

Menyikapi persoalan diatas, Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram mencegah dan menekan dampak resesi. Mulai dengan menyalurkan bantuan JPS Covid-19 untuk kebutuhan makan warga, memberikan stimulus bagi UMKM, keringanan pajak bagi pengusaha dan warga, hingga mengizinkan beroperasi kembali sektor usaha. Hal tersebut juga terlihat pada tiga bulan terakhir, dimana pemerintah kota mataram dengan cepat mengalokasikan dana Rp.135 miliar untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial masyarakat. Dari sisi lain, WaliKota Mataram Ahyar Abduh menyatakan, Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan berbagai upaya untuk menggerakkan perekonomian yang sempat lumpuh sejak 4 bulan sebelumnya, yaknidengan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restaurant ataupun dengan memberi keringanan atau penundaan pembayaran (<http://lombokpost.jawapos.com>, diakses pada 25 November 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020”** dengan harapan memperkaya literature, pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang uraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannyaitu Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahuiImplementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

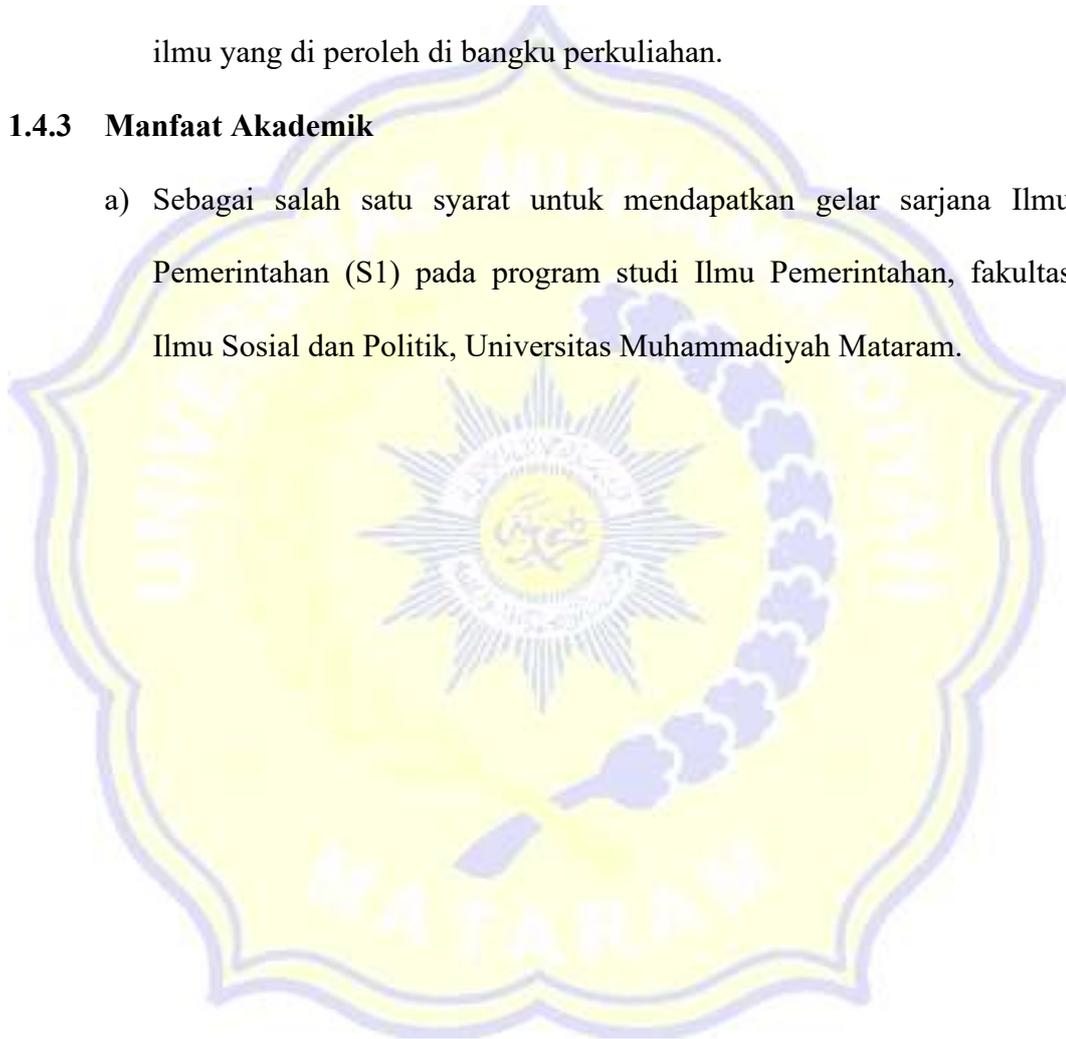
- a) Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram.
- b) Selain dari itu, peneliti dapat memperluas cakrawala berfikir secara komprehensif dan dapat memahami berbagai ilmu terkait didalamnya tentang Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian di masa yang akan datang.
- b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

1.4.3 Manfaat Akademik

- a) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, yaitu:

1. Romaully Ferbiana Silitonga (2017) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*" dalam uraiannya, peneliti tersebut menjelaskan bahwa hasil implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dikategorikan dalam 2 (dua) focus bidang, diantaranya bidang infrastruktur, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan cukup baik dan sesuai dengan apa yang rata-rata di harapkan oleh masyarakat. Dari sisi lain, secara umum faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh cultural masyarakat dan structural pemerintah seperti belum adanya payung hukum yang secara rinci mampu mengurai masalah kemiskinan serta bentuk program kebijakan yang masih bersifat pemeberian bantuan sehingga belum ada startegi yang datang dari ketidakseragaman data penduduk miskin antar SKPD.
2. Asna Aneta (2010) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Pemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*" dalam uraiannya, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program

penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan keterampilan berupa pelatihan bagi kelompok usaha masyarakat, kursus computer, pemberian bantuan modal, atau dana bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, dan program pembangunan rumah layak huni, serta kegiatan pendampingan teknis telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan kebijakan P2KP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo, meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor yang dialami dalam penelitian.

3. Marliya (2019) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu*" dalam penjelasannya, peneliti tersebut menguraikan bahwa hasil penelitian menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi, dalam penelitian belum berjalan secara baik seperti yang diharapkan. Demikian juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Faktor penghambat dalam program bantuan raskin kepada masyarakat miskin Kota Palu adalah pada aspek disposisi kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

4. Mala Antika (2017) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang*" dalam penelitiannya,

peneliti tersebut menjelaskan bahwa industri kecil dan menengah keripik opak di Desa Sidodadi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, seperti halnya mengurangi tingkat pengangguran dengan merekrut masyarakat setempat menjadi pekerja didalamnya. Industri kecil dan menengah keripik opak di Desa Sidodadi tidak menimbulkan persaingan terhadap pasar tradisional yang telah berdiri terlebih dahulu, melainkan menjadi sumber bantuan bagi para pedagang pasar tradisional. Berkurang atau bangkrutnya dua industri kerupuk opak di Desa Sidodadi dikarenakan kurangnya bahan pokok yang masuk untuk memproduksi kerupuk opak dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap metode pemasaran yang dilakukan oleh pihak dari industri tersebut.

5. Ikbal Sapsuha Dkk (2018) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*" peneliti tersebut menjelaskan bahwa adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik yakni pembangunan kualitas dalam pembangunan manusia yang maju dan mandiri melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang berbasis masyarakat sehingga pencari kerja memiliki skill dan ahli teknologi yang handal dalam bekerja. Selain dari pada itu, pembanguna dititik beratkan pada bidang ekonomi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA /TAHUN | JUDUL | METODE | HASIL PENELITIAN | RELEVANSI |
|----|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | Romauly Ferbiana Silitonga (2017) | Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat | Metode kualitatif/deskripsi | hasil implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dikategorikan dalam 2 (dua) focus bidang, diantaranya bidang infrastruktur, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan cukup baik dan sesuai dengan apa yang rata-rata di harapkan oleh masyarakat. Dari sisi lain, secara umum faktor pengahambat implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh cultural masyarakat dan structural pemerintah seperti belum adanya payung hukum yang secara rinci mampu mengurai masalah kemiskinan serta bentuk program kebijakan yang masih bersifat pemeberian bantuan sehingga belum ada startegi yang datang dari ketidakseragaman data penduduk miskin antar SKPD. | Terdapat kesamaan variabel yang menjadi focus perhatian dalam penelitian, yakni tentang kebijakan pemerintah itu sendiri. |
| 2 | Asna Aneta (2010) | Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Pemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo | Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus | implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan keterampilan berupa pelatihan bagi kelompok usaha masyarakat, kursus computer, pemberian bantuan modal, atau dana bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, dan program pembangunan rumah layak huni, serta kegiatan pendampingan teknis telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan kebijakan P2KP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo, meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur | Secara umum, dalam pembahasannya terdapat variabel penelitian yang sama, dimana variabel tersebut membahas tentang “kebijakan” |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | | birokrasi merupakan faktor yang dialami dalam penelitian | |
| 3 | Marliya (2019) | Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palu | Pendekatan Kualitatif | hasil penelitian menggambarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menelusuri aspek komunikasi, dalam penelitian belum berjalan secara baik seperti yang diharapkan. Demikian juga pada aspek disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. Faktor penghambat dalam program bantuan raskin kepada masyarakat miskin Kota Palu adalah pada aspek disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan yang tidak transparan dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. | Terdapat kesamaan focus kajian, dimana dalam penelitian tersebut pada dasarnya ada upaya-upaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang pada akhirnya itu merujuk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. |
| 4 | Mala Antika (2017) | Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang | Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif | industri kecil dan menengah keripik opak di Desa Sidodadi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, seperti halnya mengurangi tingkat pengangguran dengan merekrut masyarakat setempat menjadi pekerja didalamnya. Industri kecil dan menengah keripik opak di Desa Sidodadi tidak menumbuhkan persaingan terhadap pasar tradisional yang telah berdiri terlebih dahulu, melainkan menjadi sumber bantuan bagi para pedagang pasar tradisional. Berkurang atau bangkrutnya dua industri kerupuk opak di Desa Sidodadi dikarenakan kurangnya bahan pokok yang masuk untuk memproduksi kerupuk opak dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap metode pemasaran yang dilakukan oleh pihak dari industri tersebut. | Terdapat kesamaan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Selain dari pada, secara umum penelitian ini sama-sama membahas masalah upaya-upaya dan lain sebagainya. |
| 5 | Ikbal Sapsuha Dkk (2018) | Implementasi Kebijakan | Metode pendekatan kualitatif | adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik yakni pembangunan kualitas dalam pembangunan manusia yang maju | Terdapat kesamaan arah penelitian dalam konteks penanganan dan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara | dan mandiri melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang berbasis masyarakat sehingga pencari kerja memiliki skill dan ahli teknologi yang handal dalam bekerja. Selain dari pada itu, pembangua dititik beratkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja. | upaya-upaya penanggulangan ekonomi akibat penyebaran covid-19. |
|--|--|--|--|

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang di ambil oleh individu atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana putusan tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat berupa amanat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, kualitatif atau kuantitatif, public atau privat. Kebijakan dalam makna ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana (Ali, 2006: 4).

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Ali (2006: 4), menjelaskan arti kebijakan sebagai: *“a projected of goals values and practices”* “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prakter-prakter terarah”. Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Ali, 2006:4).

Menurut konsep Friedrich dan Anderson dalam Ali (2006:5),kebijakandiartikan sebagai :

Maka dengan demikian mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan pemerintah suatu Negara ini seyogyanya diarahkan pada apa senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Di samping itu, konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan dan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternative yang tersedia.

Selanjutnya, Raksasataya dalam Ali (2006:5),mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu:

- a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuang yang diinginkan
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

2. Tahapan Kebijakan

Kebijakan terlahir dari serangkaian keputusan yang di ambil oleh individu atau sekelompok actor politik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dunn dalam Ali (2006:35), pembuatan dan penyusunan suatu kebijakan atau program memiliki tahapan-tahapan penyusunan sebagai berikut:

a) Tahapan penyusunan agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam, realitas kebijakan public. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas dalam agenda public dipertarungkan. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu public yang akan diangkat dalam suatu penyusunan agenda kebijakan.

b) Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para actor individu atau kelompok pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan kemudian dicari pemecahan atau solusi terbaik. Pemecahan masalah tersebut terlahir dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Dalam hal ini, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (Ali, 2006:35).

3. Jenis-Jenis Kebijakan

Menurut Anderson dalam Nudin (2013:11), kebijakan terbagi atas dua bagian yakni “kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural*”. Kebijakan *substantif* adalah kebijakan yang akan dilakukan oleh

pemerintah mengenai pembangunan yang ada di daerah. Contohnya, pembangunan jalan Told dan infrastruktur lainnya. Sedangkan kebijakan *procedural* adalah kebijakan mengenai siapa yang akan diberi kewenangan mengambil keputusan. Yang termaksud dalam kebijakan *procedural* yakni undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan suatu badan tertentu dan proses yang akan dijalankan.

James E. Anderson dalam Ali (2006:29), mengelompokan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut:

- a) Kebijakan distributive
Kebijakan distributive merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan. Seperti memberi subsidi, transfer dana, insentif pajak, kredit lunak, lisensi, dan lainnya.
- b) Kebijakan redistributive
Kebijakan redistributive adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain diantaranya berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat, seperti pajak penghasilan, atau pajak progresif, prioritas pada pengusaha lemah, pendidikan, dan lainnya.
- c) Kebijakan kompetitif regulasi (*competitive regulatory*).
Kebijakan kompetitif regulasi merupakan kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa-siapa saja yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti memberikan ijin siaran TV, ijin siaran radio swasta, ijin trayek bus, ijin pendirian sekolah, ijin pendirian usaha, dan lainnya.
- d) Kebijakan protektif regulasi (*protective regulatory*)
Adalah kebijakan atau program-program yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh swasta. Maksudnya segala sesuatu aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat tidak ijin untuk dijual dipasar oleh pihak swasta. Contohnya seperti Ijin peredaran obat, pelabelan halal pada makanan, peredaran miras dan lainnya.
- e) Kebijakan regulasi
Adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan kepemilikan, contohnya

seperti kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

f) Kebijakan procedural

Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan, atau siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn dalam Akib (2010:2), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan (organisasi) pemerintah atau swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam penelitian Nakamura tentang, *Policy Implementation: Topic In American Politic*. Implementasi adalah apa yang seharusnya terjadi setelah kebijakan dibentuk. Hal ini sering menjadi bagian yang menarik dari proses pembuatan kebijakan karena merupakan titik dimana ide-ide seharusnya diterjemahkan ke dalam tindakan yang meningkatkan hasil yang akan dicapai (Silitonga, 2017:8-9).

T.B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, selanjutnya kebijakan atau program tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan (Akib, 2010:3).

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A, Gunn dalam Riyanto (2010 : 31), mengemukakan tahap implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
 - 2) Menentukan standar pelaksana.
 - 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- b) Tahap II : Merupakan Pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
- c) Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan:
 - 1) Menentukan jadwal
 - 2) Melakukan pemantuan
 - 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Secara praktis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir dalam Akib (2010:4), bahwa keefektifan dan keberhasilan terlaksananya suatu kebijakan atau program tergantung pada tiga unsure sebagai berikut:

- a) kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b) kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c) kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan oleh organisasi untuk memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Agar suatu proses implementasi kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka menurut Darwin dalam Monalisa (2017:18), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, setidaknya ada empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yakni pendayagunaan sumber, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada public.

Sedangkan menurut Jones dalam Riantor (2010: 29), aktivitas implementasi kebijakan public melibatkan tiga hal, yakni: *Pertama*, aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali unit-unit, dan model-model yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan sasaran kebijakan. *Kedua*, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. *Ketiga*, aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Monalisa (2017:19), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah yang bersifat desentralistis, yaitu sebagai berikut:

- a) Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup sosial cultural serta keterlibatan penerima program.
- b) Hubungan antara organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat berpengaruh bagi keberhasilan suatu program.
- c) Sumber daya organisasi untuk implementasi program. Implementasi perlu didukung sumberdaya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber sumber daya non manusia (*non human resources*).
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Implementasi kebijakan yang efektif dapat dipahami dan dianalisis dengan menggunakan berbagai model implementasi kebijakan. Diantaranya Quade dalam Akib (2010: 4), memberikangambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan public, yaitu:

- a) kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkannya.
- b) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
- c) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan.
- d) Faktor lingkungan, yaitu elemen system dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Riyanto (2010: 32), mengajukan model mengenai implementasi kebijakan. Dalam model ini Van meter dan Van horn dalam teorinya mendasarkan pada argumen bahwa perbedaan-

perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

Van meter dan Van horn dalam Monalisa (2017: 22), mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan,
- b) Sumber daya,
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
- d) Karakteristik agen pelaksana,
- e) Sikap para pelaksana, dan
- f) Lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan.

Van Meter dan Van Horn dalam Sulaeman (1998), mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standardan tujuan kebijakan adalah

penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan (<https://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses pada 20 Desember 2020).

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya financial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (1974) menegaskan bahwa “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah penting tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan (<https://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses pada 20 Desember 2020).

c) Komunikasi antar organisasi dan Penguat Aktivitas

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi merupakan urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan dan sasarannya.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan secara maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e) Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan public biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

f) Lingkungan Ekonomi Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif (<https://apransiregar.wordpress.com>, diakses pada 20 Desember 2020).

Selanjutnya Gogin dalam Riyanto (2010 :36) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi, sebagai berikut: (a) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. (b) Kemampuan organisasi, dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. (c) Pengaruh lingkungan, dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

2.2.3 Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan pelaku atau actor dalam sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengatur system pemerintahan dan menetapkan kebijakan-kebijakan

dalam mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah merupakan suatu system yang menjalankan wewenang atau kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Ensiklopedia Nasional Indonesia dalam Ali dan Alam (2016:3), memberikan terminology “Pemerintah” dalam dua sisi pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan dalam pengertian secara luas. Secara sempit pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan pengertian secara luas pemerintah adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu Negara, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan legislative dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak saja difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai kegiatannya dalam kehidupan suatu Negara baik itu lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Pemerintah dibagi atas dua bagian yaitu: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Ali dan Alam 2016: 3).

Pemerintah pusat atau biasa disebut pemerintah adalah sebutan umum untuk pemerintah suatu Negara yang mengendalikan jalannya pemerintahan. Pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara yang dibantu oleh wakil Presiden dan Mentrinya. Sedangkan pemerintah daerah merupakan entitas yang dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan disini

ialah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan pelaku atau actor dalam sebuah lembaga atau organisasi pemerintahan dalam suatu Negara yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengatur system pemerintahan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan dan cita-citan Negara.

Mengacu dari pengertian pemerintah pada uraian diatas, maka secara umum terdapat 4 fungsi utama pemerintah, yakni sebagai berikut:

a. Fungsi Pengaturan

Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempunyai fungsi pokok yakni membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat supaya tercapainya kehidupan yang lebih dinamis dan harmonis.

b. Fungsi Pelayan

Secara umum pelayanan ini yakni meliputi pelayanan public juga pelayanan sipil, berdasarkan yang mengedepankan kesetaraan. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk masyarakatnya ialah mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, agama, keuangan, ketahan dan pertahanan.

c. Fungsi Pembangunan

Pemerintah perlu melakukan berbagai pembangunan diseluruh pelosok negeri baik itu pusat atau daerah. Dimana maksudnya pembangunan disini ialah bukan sekedar melakukan pembangunan infrastruktur saja, namun juga melakukan pembangunan mental spiritual warga Negara.

d. Fungsi Pemberdayaan

Sedangkan fungsi pemberdayaan ialah fungsi untuk mendukung otonomi daerah masing-masin, sehingga mengelolah daerahnya sesuai dengan sumber daya yang ada secara maksimal. Selain itu, demi mencapai tujuan tersebut, tentu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran dari masyarakat atau swasta dalam setiap kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan (Ilyas, dkk, 2020: 47).

3. Tujuan Pemerintah/Pemerintahan

Lembaga pemerintah atau pemerintahan dibentuk tentu dengan beberapa tujuan. Adapun tujuan pemerintah dalam (<https://pelayananpublik.id>, diakses 21 Oktober 2020), yakni sebagai berikut:

- a) Melindungi hak asasi manusia.
- b) Menjalankan konstitusi sehingga setiap warga Negara diperlakukan dengan adil.
- c) Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsure yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.

- d) Memajukan kesejahteraan umum.
- e) Membuat dan menjaga system moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestic dan internasional berjalan dengan baik.

Dengan penjelasan pengertian pemerintah beserta tugas dan fungsinya, maka tentu dapat dilihat bahwa peran pemerintah pada suatu Negara sangat besar. Sehingga, seseorang atau lembaga yang ditugaskan serta bertujuan demi kesejahteraan Negara, maka harus dilakukan dan jalankan dengan baik dan tepat.

2.2.4 Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)

Coronavirus Desease 2019 (Covid-19), merupakan virus RNA strain tunggal positif. Virus ini juga disebut dengan *virus zoonotik*, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan kepada manusia bersifat sensitive terhadap suhu panas. Covid-19 juga adalah virus jenis baru yang sangat mematikan dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini diperkirakan dari hewan umumnya kelelawar, dan bisa menular dari hewan ke manusia bahkan dari manusia ke manusia lainnya. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan yang mampu menyembuhkan infeksi Virus Corona (<https://www.alodokter.com>, diakses pada 17 November 2020). Sebagaimana yang dijelaskan oleh WHO (*World Health Organization*), Covid-19 merupakan virus dari subfamily Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan Ordo

Nidovirales yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat (Ashidiqie, 2020: 912).

Virus ini sangat berbahaya, karena transmisi atau penyebarannya cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia pada tahun 2003. Virus ini menyerang saluran pernapasan manusia dan menyebar melalui tetesan kecil (doplet) dari hidung atau mulut penderita pada saat batuk dan bersin.

1. Proses Transmisi Covid-19

Adapun proses transmisinya dapat terjadi dengan tiga metode yaitu sebagai berikut:

- a) Doplet penderita pada saat batuk atau bersin jatuh pada benda disekitarnya, kemudian ada lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan doplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan, maka orang tersebut dapat terinfeksi covid-19.
- b) Seseorang tanpa sengaja menghirup doplet dari objek penderita atau seseorang yang telah terinfeksi covid-19.
- c) Kontak pribadi seperti berjabat tangan dengan objek penderita virus tersebut (<https://www.alodokter.com>, diakses pada 17 November 2020).

2. Ciri-Ciri Gejala Dan Terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Adapun Ciri-ciri gejala awal dan terinfeksi Covid-19 yaitu pada awalnya seseorang akan mengalami gejala mirip flu, batuk-batuk, pilek,

serta mengalami demam dalam kurun waktu beberapa hari hingga mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru (pneumonia). Selanjutnya, gejala dapat sembuh dan terkadang malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan corona (<https://www.alodokter.com>, diakses pada 17 November 2020).

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yakni:

- a) Demam (suhu tubuh diatas 38 derajat celcius)
- b) Batuk kering
- c) Sesak napas

Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara yakni, sebagai berikut:

- a) Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita covid-19 batuk atau bersin.
- b) Memegang hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid-19.
- c) Kontak jarak dekat dengan penderita covid-19 dan lain-lain

(<https://www.alodokter.com>, diakses pada 17 November 2020).

Pada penelitian Gupta Et Al dalam Nurislaminingsih (2020: 23-24), menjelaskan seseorang dengan riwayat penyakit diabetes lebih rentan

terserang virus seperti flu, termasuk Virus Corona. Selain itu, orang dengan riwayat penyakit jantung, ginjal, lanjut usia, dan daya tahan tubuh yang lemah juga menjadi golongan-golongan orang-orang yang memiliki resiko tinggi tertular Covid-19.

Juga El Zowalaty dan Jarhult dalam Nurislaminingsih (2020:23-24), mengatakan system paru-paru manusia rentan terhadap infeksi karena berkaitan dengan anggota tubuh lain. Aktivitas mata, hidung, atau mulut dapat mempengaruhi tingkat kesehatan paru-paru. Kondisi ini berlaku pada semua orang berapapun usianya. Sebagai contoh udara kotor yang terhirup hidung atau terhisap oleh mulut akan berdampak pada paru-paru. Hal ini yang terjadi pada penyebaran Virus Corona pada manusia. Mata, hidung dan mulut yang terkontaminasi Virus ini mengakibatkan paru-paru menjadi tidak sehat sehingga mudah flu, batuk, dan sesak nafas.

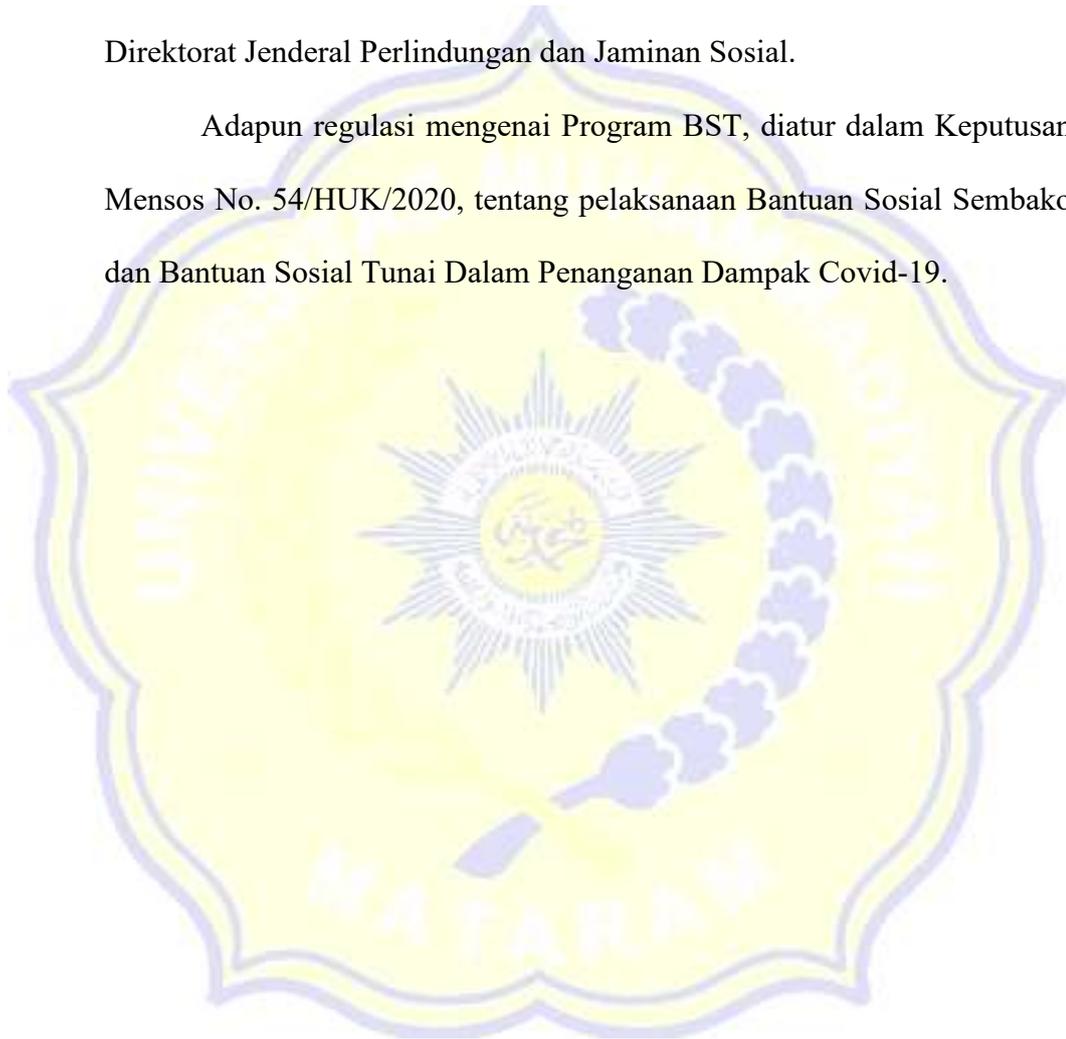
2.2.7 Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum pernah menerima Bansos reguler, yakni Program keluarga harapan (PKH) dan Program Sembako (<https://kemensos.go.id>, diakses pada 29 Desember 2020). Tujuan dari program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Program BST dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, (meliputi Kecamatan

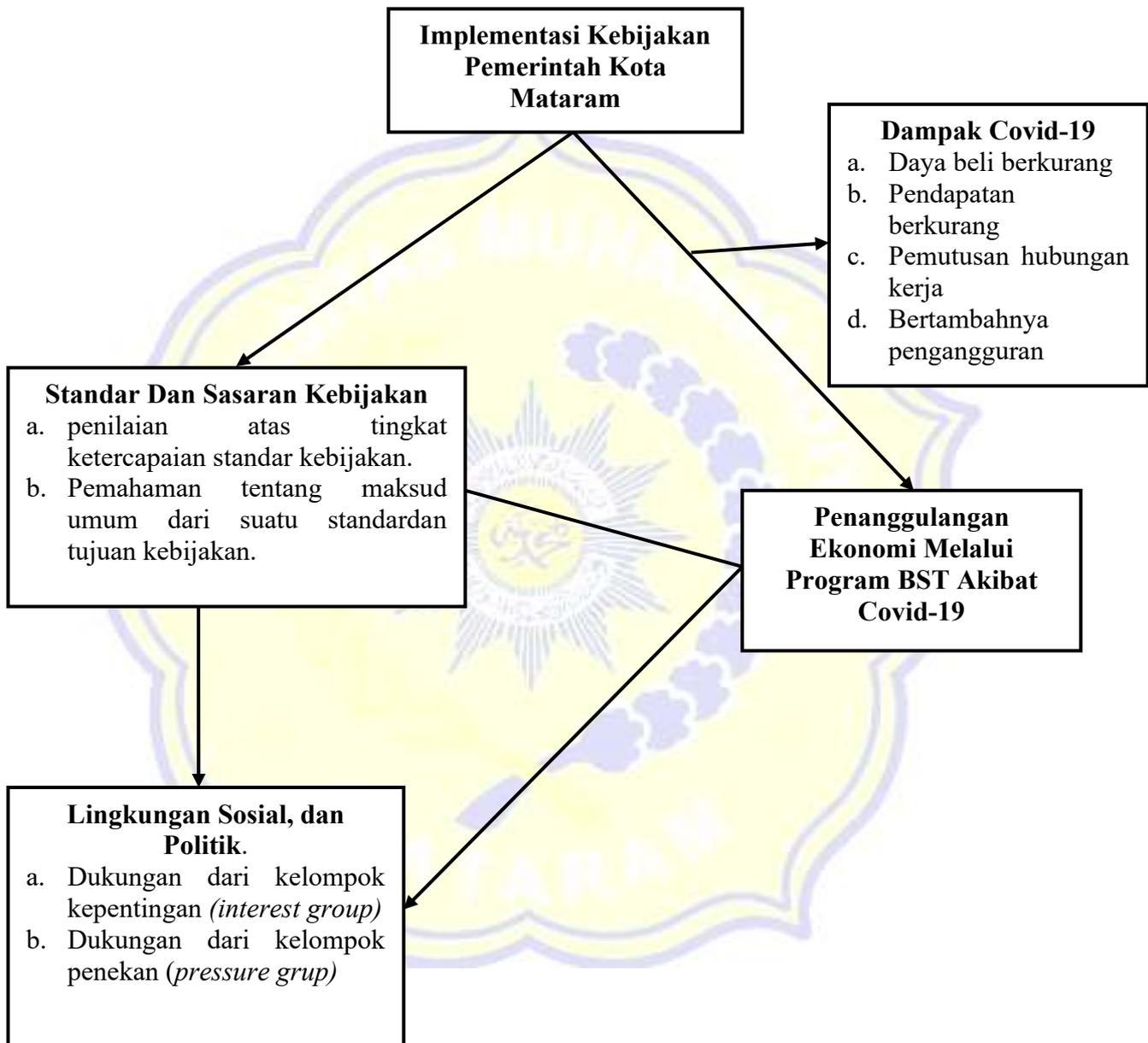
Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan BodongGede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Pengecualian beberapa Kota/Kabupaten diatas karena lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adapun regulasi mengenai Program BST, diatur dalam Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020, tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.



2.3 Kerangka Pikir

Tabel 2.3
Kerangka Pikir



Sumber: Van Meter Van Horn (1975).

2.4 Definisi Konseptual

1. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Standard dan Sasaran Kebijakan, yakni untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.
2. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik, yakni sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Table 2.1
Definisi Oprasional

| No | Variabel | Indicator | Sumber Data |
|----|---------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Standard dan Sasaran Kebijakan. | a. penilaian atas tingkat ketercapaian standar kebijakan. | a. Skunder b. Primer |
| | | b. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standardan tujuan kebijakan. | |
| 2 | Lingkungan Sosial, Dan Politik. | a. Dukungan dari kelompok kepentingan(<i>interest group</i>) b. Dukungan dari kelompok penekan (<i>pressure grup</i>) | a. Skunder b. Primer |

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran tersebut, tidak cukup dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang juga digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Tipe penelitian ini dianggap sangat efektif untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu pada Kantor Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Mataram dan Dinas Sosial (DINSOS) Kota Mataram.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 bulan mulai pada bulan Januari samapai 15 Ferbruari 2020.

3.4 Tehnik Penentuan Narasumber

Menurut sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, adapun yang dimaksud *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang atau sebjek tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan informasi atau tentang situasi yang diteliti.

Tabel 3.2
Narasumber Penelitian

| No | Narasumber | Jumlah |
|--------------|--|-----------|
| 1 | Kepala Dinas Sosial | 1 |
| 2 | Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Mataram | 1 |
| 3 | Ketua Somasi NTB | 1 |
| 4 | Fitra NTB | 1 |
| 5 | Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan | 12 |
| Total | | 16 |

3.5 Jenis Data

Sugiyono (2014) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data bersumber dari data primer dan data skunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber data yang langsung diperoleh dari pihak pertama. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari pihak yang bersangkutan melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan informen.

Tabel 3.3
Unit Analisa Data Primer

| No | Variabel | Indikator | Sumber Data |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1 | Standar dan Sasaran Kebijakan. | a. penilaian atas tingkat ketercapaian standar kebijakan. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kebijakan apa yang ditawarkan. ✓ Apa bentuk kebijakannya. ✓ Siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan penyaluran BST. |
| | | b. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standardan tujuan kebijakan. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bagaimana proses pencapaiannya. ✓ Pertimbangan tentang kebutuhan masyarakat. ✓ Analisa kebutuhan BST oleh kelompok sasaran. |
| 2 | Lingkungan sosial, dan politik | a. Dukungan dari kelompok kepentingan(<i>interest group</i>) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelompok mana saja yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran BST. |
| | | b. Dukungan dari kelompok penekan (<i>pressure grup</i>) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bentuk dukungan masyarakat. |

3.5.2 Data Skunder

Data skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber-sumber lain yang tidak langsung. Seperti dari data-data atau dokumen-dokumen dari objek yang akan diteliti.

Tabel 3.4
Unit Analisa Data Skunder

| No | Variabel | Indikator | Sumber Data |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1 | Standar dan Sasaran Kebijakan. | a. penilaian atas tingkat ketercapaian standar kebijakan. | ✓ Data kelompok sasaran penerima BST. ✓ Regulasi Program BST |
| | | b. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standardan tujuan kebijakan. | |
| 2 | Lingkungan sosial, dan politik. | a. Dukungan dari kelompok kepentingan b. Dukungan dari kelompok penekan (<i>pressure grup</i>) | ✓ Dokumentasi pertemuan para tokoh dengan pemerintah daerah dalam mendukung program BST. ✓ laporan evaluasi LSM tentang pelaksanaan program BST. |

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi juga adalah metode dasar dalam memperoleh data dalam penelitian kualitatif. penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu

peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

3.7.2 Wawancara/Interview

Tehnik wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3.7.3 Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui catatan tertulis, fakat yang terarsip, seperti catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklendam Moleong (2018: 280), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun Proses analisis data dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

3.8.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman yang pokok, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

3.8.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berupaya mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna memadatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.